



ARAH KEBIJAKAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2027

Febrian Alphyanto Ruddyard, S.I.P, M.A
Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Bandung, 15 April 2026

Disampaikan Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Barat 2026



PEMBANGUNAN DI TAHUN 2027 DIHADAPKAN PADA BERBAGAI TANTANGAN GLOBAL DAN DOMESTIK

Tantangan Global 2027



Adanya ketidakpastian kebijakan perdagangan akibat adanya kebijakan tarif dan pembatasan perdagangan



Dinamika ketegangan geopolitik serta geoekonomi yang berpotensi mengganggu stabilitas global



Risiko utang global yang tinggi dan defisit fiskal lebih lebar karena adanya pengetatan kondisi keuangan global



Ketimpangan teknologi dan disrupsi AI yang dapat meningkatkan kesenjangan antar negara



Perubahan iklim ditandai dengan peningkatan suhu global berpotensi mengganggu stabilitas harga pangan

Sumber: OECD, WEF, World Bank, dan IMF

Tantangan Domestik 2027



Meningkatnya utang publik dan swasta yang jatuh tempo dan dapat menekan ruang fiskal dan memperlebar defisit



Produktivitas dan kesejahteraan pekerja masih rendah dan dapat menghambat penguatan konsumsi domestik



Overregulasi dan proses perizinan masih cenderung kompleks yang menghambat arus investasi



Ketergantungan ekspor komoditas bernilai rendah yang meningkatkan kerentanan terhadap gejolak harga global



Adopsi teknologi dan digitalisasi belum merata dapat memperlambat transformasi digital dan menurunkan daya saing

Sumber: OECD, World Bank, dan Kompas.com

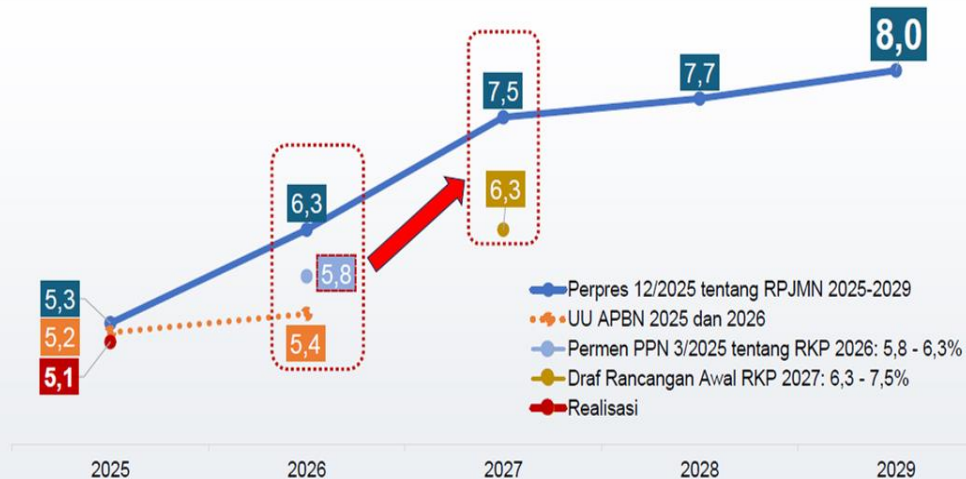


SASARAN RKP 2027 MERUPAKAN FASE AKSELERASI PERTUMBUHAN SEBAGAI JEMBATAN MENUJU PERTUMBUHAN EKONOMI 8%



Target RKP 2027 berada pada fase akselerasi pertumbuhan sebagai jembatan menuju 8% pada 2029 sesuai RPJMN 2025-2029

SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI 2025-2029 (dalam persen)



Sumber : Perpres 12/2025 tentang RPJMN 2025-2029; UU APBN 2025 dan 2026; Permen PPN 3/2025 tentang RKP 2026.

PERTUMBUHAN TINGGI BERKELANJUTAN

	2025	2026	2027
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,11	5,4	6,3 – 7,5
GNI per Capita (US\$)	5.220 (outlook)	5.520	5.980–6.050
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	43,72 (2024)	37,14	39,57
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,53 (2024)	76,67	76,84

PENURUNAN KEMISKINAN

	2025	2026	2027
Tingkat Kemiskinan (%)	8,25	6,5 – 7,5	6,0 – 6,5
Kemiskinan Ekstrem (%)	0,85	0,0-0,5	0
Rasio Gini	0,363	0,377-0,380	0,375-0,378
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,74	4,44-4,96	4,30 – 4,87

SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS

	2025	2026	2027
Indeks Modal Manusia	0,54 (2023)	0,57	0,58

INDIKATOR PEMBANGUNAN 2027

	2025	2026	2027
Indeks Kesejahteraan Petani	0,6930 (2023)	0,7731	0,8038
Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	24,50	35,00	40,81

Keterangan: Perpres 12/2025 RPJMN 2025-2029, Rperpres RKP 2026, dalam proses exercise Bappenas November 2025

SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DAN JAWA BARAT 2027 DIDORONG OLEH SUMBER PERTUMBUHAN YANG PRIORITAS

SASARAN PERTUMBUHAN NASIONAL

6,3 – 7,5
(persen)

PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2027

Sisi Produksi	Pertumbuhan 2027	Pertumbuhan 2027	Sisi Pengeluaran
Pertanian	4,5 – 4,7	5,8 – 6,8	Konsumsi Masyarakat
Pertambangan	2,6 – 2,8		
Industri Pengolahan	6,4 – 7,5	6,6 – 8,1	Konsumsi Pemerintah
Konstruksi	6,4 – 8,2		
Perdagangan	6,0 – 7,0	7,0 – 8,5	PMTB/Investasi
Penyediaan Akmamin	9,6 – 11,1	7,5 – 8,2	Ekspor Barang & Jasa
Transportasi & Pergudangan	9,9 – 11,0		
Informasi & Komunikasi	9,1 – 10,8	7,3 – 7,9	Impor Barang & Jasa

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional sebesar **6,3 – 7,5 persen** di tahun 2027, Jawa Barat perlu tumbuh sebesar **6,3 - 7,5 persen**, dengan diikuti perbaikan pada indikator-indikator makro lainnya

SASARAN MAKRO JABAR

Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan 2027

Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,3 – 7,5
-------------------------	-----------

Penurunan Kemiskinan 2027

Tingkat Kemiskinan (%)	4,78 – 5,30
Rasio Gini	0,381 – 0,397
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,05 – 6,49

Sumber Daya Manusia Berkualitas 2027

Indeks Modal Manusia	0,579 – 0,594
----------------------	---------------



RENCANA PEMBANGUNAN DI TAHUN 2027 DITUANGKAN DALAM TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN RKP TAHUN 2027

Tema Rancangan Awal RKP 2027: “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”



Produktivitas

Kualitas SDM, Tenaga Kerja Produktif, Inovasi

- Makan Bergizi Gratis ★
- Revitalisasi Sekolah ★
- Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul ★
- Layanan Berkualitas dan Akses Kesehatan Gratis ★
- Digitalisasi Pendidikan ★
- Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Stimulus untuk Produktivitas & Daya Beli Masyarakat

- Kartu Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Nasional ★
- Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ★
- Pembiayaan Perumahan dan Penanganan Pemukiman Kumuh (Gentengisasi)
- Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Digitalisasi dan Efisiensi Tata Kelola

- Satu Data Sosial Ekonomi (DTSEN)
- Layanan Digital Optimal dan Terintegrasi di Sektor Strategis
- Pemerintahan Digital yang Merata
- Tanggap Darurat Bencana

Regulasi dan Kelembagaan

- Diplomasi Tangguh (Perlindungan, Ekonomi, Budaya, Kepemimpinan, Pertahanan dan Kedaulatan)
- Integritas Tata Kelola Pemerintah



Investasi

Efisiensi dan Efektivitas Investasi

- Pengelolaan Sampah (Instalasi PSEL) ★
- Investasi Hijau Berkelanjutan
- Kemudahan Perizinan

Infrastruktur dan Konektivitas Ekonomi

- Infrastruktur Dasar
- Konektivitas Logistik
- Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan

Inovasi Pembiayaan Pembangunan

- Optimalisasi Danantara dan Peran BUMN
- Pembiayaan Pembangunan Berbasis Kovensional dan Syariah

Investasi Berorientasi Industri dan Ekspor

- Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus
- Destinasi Pariwisata Prioritas



Industri

Industri Nasional

- Industri Besar Strategis Nasional
- Pengembangan Mobil Nasional ★
- Pengelolaan Sampah ★

Hilirisasi SDA Strategis

- Hilirisasi Kelautan dan Perikanan (Pengembangan Industri Garam dan Produk Hasil Laut) ★
- Hilirisasi Perkebunan dan Kehutanan (Hilirisasi Kelapa Sawit) ★
- Hilirisasi Mineral dan Migas ★

Swasembada Pangan, Energi, dan Air

- Swasembada Pangan (KSPP) ★
- Swasembada Energi ★
- Swasembada Air (*Giant Sea Wall*) ★

★ Keterangan: Direktif Presiden





DUKUNGAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL DI JAWA BARAT



Tugas Bappenas dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN):



Perumusan
Kebijakan



Perencanaan
& Penetapan



Evaluasi &
Pengendalian

AMANAT PRESIDEN MELALUI PERPRES 195 TAHUN 2024

Proyek Strategis Nasional

Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis, terukur, dan berdampak signifikan untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas 4 Tahun 2025

Keterpaduan dengan Tujuan dan Agenda Pembangunan

Tujuan: Trisula Pembangunan

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Menurunkan Kemiskinan

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya
Manusia

Fokus Presiden

1

Swasembada
Pangan

2

Swasembada
Air

3

Swasembada
Energi

4

Hilirisasi
Komoditas
dan Industri

Highlight PSN di Provinsi Jawa Barat

- ❖ PSEL Bekasi, Bandung, dan Bogor Raya
- ❖ SPAM Regional Jatiluhur
- ❖ Double Track Jawa Selatan
- ❖ KEK Lido
- ❖ Kawasan Industri Patimban Industrial State
- ❖ Pembangunan Jaringan Gas Kota
- ❖ Bendungan Cipanas
- ❖ Revitalisasi Tambak Pantura



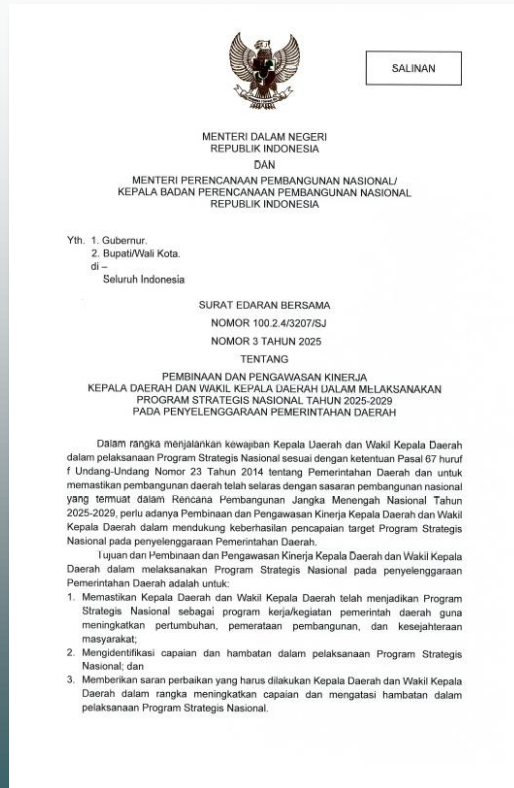
Diperlukan:

- ❖ Sinergi perencanaan pusat-daerah dalam dokumen perencanaan
- ❖ Dukungan pelaksanaan sesuai kewenangan
- ❖ Turut serta dalam *monitoring* dan pengendalian pelaksanaan di daerah



SURAT EDARAN BERSAMA (SEB) MENDAGRI - MENPPN

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KINERJA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL TAHUN 2025-2029 PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



Bappenas - Kemendagri bersama K/L terkait berperan dalam menjaga pelaksanaan ProSN untuk **mendukung pelaksanaan RPJMN dan RKP** serta **menerima laporan kinerja Program Strategis Nasional**



Butir 2 SEB Mendagri & MenPPN, Program Strategis Nasional meliputi:



- Penanggulangan Kemiskinan** dengan proyek/Kegiatan:
 - Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 - Sekolah Rakyat; dan
 - Pembangunan 3 Juta Rumah
- Ketahanan Pangan** dengan proyek/kegiatan Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah.
- Kesehatan Untuk Semua** dengan proyek/kegiatan:
 - Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - Makan Bergizi Gratis.
- Perluasan Akses Pendidikan** dengan proyek/kegiatan Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah
- Pertumbuhan Ekonomi** dengan proyek/kegiatan:
 - Pengendalian Inflasi;
 - Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
 - Kemudahan perizinan di daerah.
- Program Strategis Nasional** dengan proyek/kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Presiden



SINKRONISASI PERENCANAAN PUSAT-DAERAH MELALUI KODE REFERENSI INDIKATOR PEMBANGUNAN

Indikator SIPD

000068 - Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)

Indikator SDGs

2.1.1* - Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).

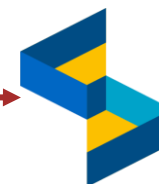
Indikator RKP

02.10.02.02 - Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

**KRISNA
Bappenas**



**Kode Referensi Indikator
Pembangunan Tunggal***



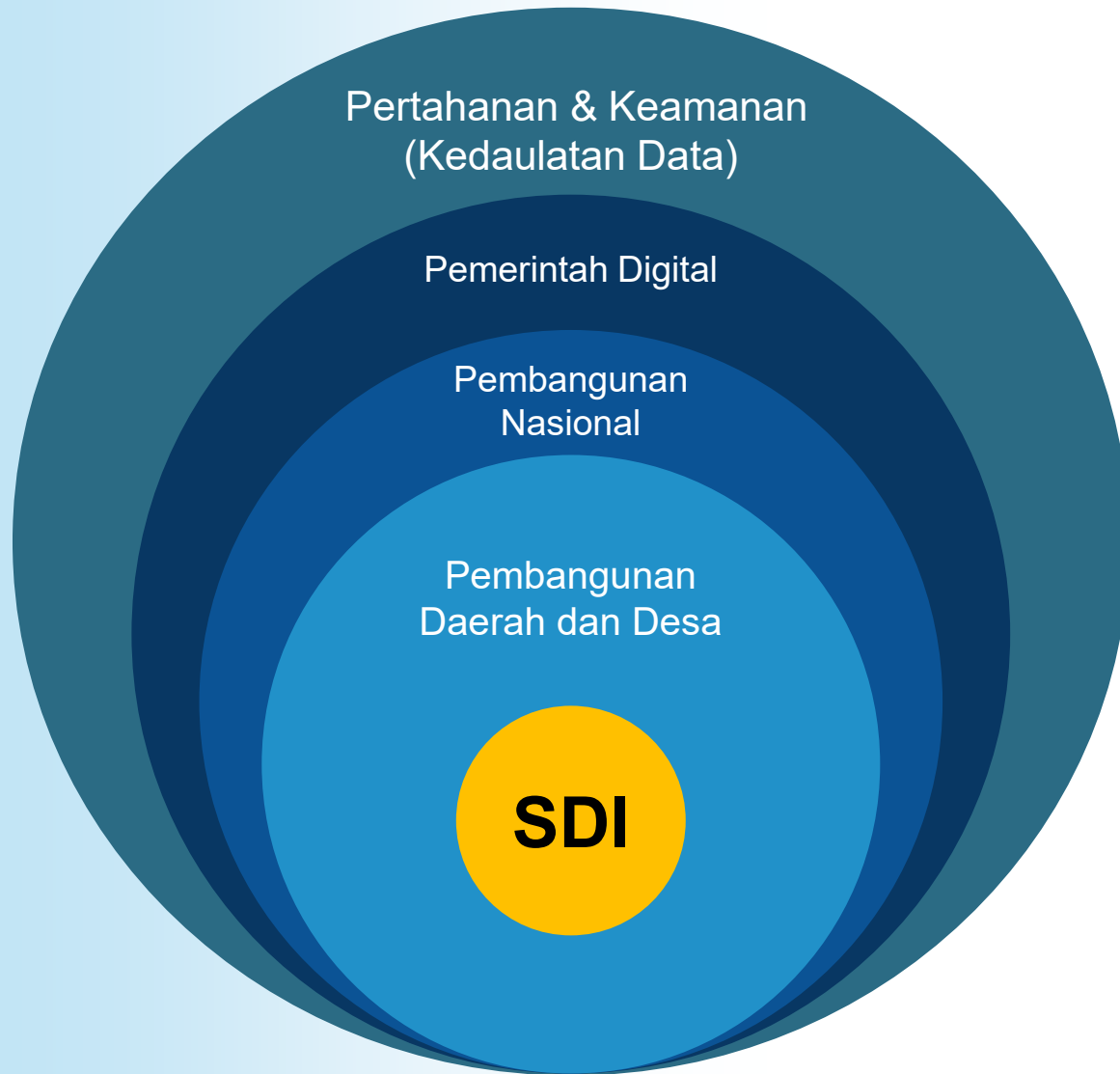
SIPD
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
Republik Indonesia

Sinkronisasi Perencanaan
Pusat-Daerah

*akan terus dilengkapi terus seluruh indikator agar bisa menghasilkan harmoni pembangunan

Implementasi
Indikator
Pembangunan dalam
Portal SIPD

INDIKATOR OUTCOME									
Shift Scroll untuk geser ke kanan									
Menampilkan 10 data per halaman	Kode Referensi Indikator Pembangunan						Pencarian:		
Kode Indikator Outcome	Kode Referensi Nasional	Indikator Outcome	Satuan	Definisi Operasional	Peraturan	Kewenangan	Tujuan Pembangunan Daerah	Aspek Informasi Pembangunan Daerah	
000233	SDI-Bappenas 01.02.014	Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasional	Orang	Jumlah Keanggotaan dan Kontribusi dalam Forum dan Organisasi Internasional mencakup evaluasi keterlibatan dan kontribusi suatu negara dalam organisasi dan forum internasional berdasarkan keanggotaan mereka dan kontribusi yang diberikan. Komponen Utama 1. Keanggotaan dalam Forum dan Organisasi Internasional: Definisi: Status keanggotaan suatu negara dalam forum dan organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), NATO, dan lainnya. Kriteria: Jumlah organisasi internasional yang menjadi anggota, serta peran dan posisi dalam organisasi tersebut. 2. Kontribusi dalam Forum dan Organisasi Internasional: Definisi: Partisipasi		PROVINSI KABKOTA	Daya saing Daerah	Daya Saing Daerah	



Satu Data Indonesia (SDI) sebagai Inti Pembangunan & Orkestrator Data Nasional

berperan dalam:

Menentukan produsen data tunggal dalam mewujudkan **single source of truth**

Menata kelola data multisektor dan multijenis tingkat nasional

Mengendalikan integrasi dan akses data nasional

Mendukung implementasi **keamanan dan perlindungan data**

Menjaga **harmonisasi pembangunan nasional, pusat-daerah-desa**



CATATAN PENUTUP : PERENCANAAN YANG BAIK MERUPAKAN KUNCI PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN

1

RKP 2027 agar menjadi dasar penyusunan program-program yang terukur dan berdampak pada pembangunan dengan memperhatikan kaidah Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial

2

Melakukan penguatan proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, khususnya terhadap pengalokasian anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan

3

RKP 2027 agar menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam **memastikan capaian sasaran dan prioritas pembangunan, baik di pusat maupun di daerah**

4

Melakukan penguatan koordinasi pelaksanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah, termasuk membuka ruang dialog dengan pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil untuk perencanaan dan pelaksanaan perencanaan yang partisipatif.



Tumbuh bersama
Indonesia

BerAKHLAK
Integritas Pelayanan, Akuntabilitas, Kompetensi,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

Terima kasih.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

